

Efektivitas Pengelolaan Anggaran Program Adikarya Parlemen DPRD Provinsi Jawa Barat

Febriana Eureka Halim^{1*}, Nina Karlina²

^{1,2} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, Bandung

* E-mail Korespondensi: febriana21002@mail.unpad.ac.id

Information Article

History Article

Submission: 05-06-2025

Revision: 19-06-2025

Published: 02-08-2025

DOI Article:

10.24905/permana.v17i3.930

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan anggaran Program Adikarya Parlemen DPRD Provinsi Jawa Barat berdasarkan delapan kriteria efektivitas dari (Makmur, 2011), serta memberikan rekomendasi perbaikan program. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan desain deskriptif, melalui wawancara mendalam, studi dokumen, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan program telah berjalan cukup baik secara administratif dan memenuhi beberapa kriteria efektivitas, terutama dalam aspek *personal branding*, transparansi kegiatan, dan kepatuhan prosedur. Namun, masih ditemukan hambatan seperti keterlambatan pelaporan, belum adanya kebijakan teknis penggunaan dana, serta minimnya evaluasi berbasis *outcome*. Tingkat efektivitas realisasi anggaran dari tahun 2021 hingga 2023 menunjukkan tren meningkat secara kuantitatif, tetapi efektivitas substantif belum optimal karena tidak adanya pengukuran terhadap manfaat publik. Temuan ini menekankan pentingnya penyusunan pedoman teknis, penguatan kapasitas staf, serta pengembangan indikator keberhasilan berbasis dampak. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan praktis bagi Sekretariat DPRD dan anggota legislatif dalam mengelola anggaran program publikasi secara lebih akuntabel, terukur, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Kata Kunci: Anggaran, Efektivitas, Pengelolaan

A B S T R A C T

This study aims to evaluate the effectiveness of budget management in the Adikarya Parliament Program of the Regional People's Representative Council (DPRD) of West Java Province, using eight effectiveness criteria proposed by (Makmur, 2011), and to provide recommendations for program improvement. The research uses a qualitative approach with a descriptive design, collecting data through in-depth interviews, document analysis, and field observation. The research results indicate that the program management has been carried out fairly well administratively

Acknowledgment

and meets several effectiveness criteria, especially in aspects of personal branding, activity transparency, and adherence to procedures. However, issues such as delayed reporting, lack of technical guidelines for fund utilization, and limited outcome-based evaluation remain. The budget realization trend from 2021 to 2023 shows consistent quantitative improvement, yet substantive effectiveness is still limited due to the absence of public impact measurement. These findings highlight the need for standardized technical policies, capacity building for staff, and the development of performance indicators based on public benefit. This study is expected to provide practical insights for the DPRD Secretariat and legislators in managing the program's budget in a more accountable, measurable, and community-responsive manner.

Key word: Budget, Effectiveness, Management

© 2025 Published by Permana. Selection and/or peer-review under responsibility of Permana

PENDAHULUAN

Anggaran sektor publik memiliki peran strategis sebagai alat perencanaan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang bertujuan untuk memastikan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penggunaan dana (Majid, 2019). Dalam konteks pemerintahan daerah, anggaran menjadi fondasi utama operasional yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Salah satu aspek penting dari pengelolaan anggaran adalah realisasi anggaran yang mencerminkan sejauh mana dana yang dialokasikan berhasil dimanfaatkan untuk mencapai tujuan program (Bastian, 2020). Efektivitas pengelolaan anggaran menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan implementasi suatu program, termasuk dalam ranah legislatif daerah (Siagian, 2005).

Sebagai lembaga legislatif daerah, DPRD Provinsi Jawa Barat menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang ditujukan untuk meningkatkan akuntabilitas serta transparansi pemerintahan (Mintarti et al., 2019). Dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi tersebut sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, diluncurkanlah Program Adikarya Parlemen sejak tahun 2021. Program ini bertujuan untuk meningkatkan publikasi, sosialisasi, serta edukasi masyarakat melalui pelaporan kegiatan dan kinerja anggota DPRD (Standar Operasional Prosedur Program Adikarya Parlemen Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, 2021). Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa

Barat Nomor 189 Tahun 2021, setiap anggota menerima alokasi anggaran yang sama, dengan target realisasi sebesar Rp5.000.000 per bulan. Namun, data realisasi anggaran selama tahun 2021–2023 menunjukkan bahwa meskipun terjadi peningkatan dari tahun ke tahun, realisasinya belum mencapai 100% dari target, yang mengindikasikan adanya potensi masalah dalam efektivitas pengelolaannya.

Tabel 1. Target dan Realisasi Anggaran Program Adikarya Parlemen DPRD Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 -2023

Program Adikarya Parlemen DPRD Provinsi Jawa Barat			
Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Persentase Realisasi
2021	Rp7.200.000.000	Rp6.061.911.000	84.19%
2022	Rp7.200.000.000	Rp6.496.093.000	90,22%
2023	Rp7.200.000.000	Rp6.911.091.000	95.98%

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Program Adikarya Parlemen DPRD Prov. Jawa Barat

Dalam konteks program ini, efektivitas pengelolaan anggaran hanya dapat tercapai jika prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai tiga pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik diintegrasikan secara menyeluruh dalam seluruh proses administrasi dan pengelolaan anggaran (Cindy, 2019). Beberapa penelitian sebelumnya telah menyoroti pentingnya efektivitas dalam pengelolaan anggaran program pemerintah daerah, termasuk pemanfaatan anggaran berbasis kinerja dan akuntabilitas. Namun, kajian yang secara khusus membahas efektivitas program komunikasi legislatif seperti Adikarya Parlemen masih terbatas. Dengan mengacu pada teori efektivitas anggaran dari Makmur, yang meliputi aspek pencapaian tujuan, efisiensi, dan ketepatan pelaksanaan, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis seberapa efektif pengelolaan anggaran dalam mendukung capaian program Adikarya Parlemen.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan anggaran Program Adikarya Parlemen DPRD Provinsi Jawa Barat dengan menganalisis kesesuaian antara alokasi dan realisasi anggaran, serta menilai sejauh mana tujuan program tercapai. Hasil yang diharapkan adalah gambaran menyeluruh mengenai keberhasilan implementasi anggaran program ini, sekaligus rekomendasi perbaikan untuk pengelolaan di masa mendatang. Penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi praktis bagi DPRD dalam mengevaluasi program serupa, serta manfaat akademis sebagai rujukan dalam pengembangan kajian pengelolaan keuangan

publik di tingkat daerah.

Melalui analisis yang komprehensif, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengukur efektivitas dari segi administratif, tetapi juga dari segi manfaat yang dirasakan oleh publik. Keberhasilan Program Adikarya Parlemen dalam membangun citra, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan memperkuat komunikasi publik akan menjadi tolak ukur penting dalam efektivitas anggaran. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya relevan untuk lingkup Jawa Barat, tetapi juga dapat menjadi acuan bagi DPRD di wilayah lain yang ingin mengadopsi program serupa secara lebih efektif dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan deskriptif untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan anggaran Program Adikarya Parlemen DPRD Provinsi Jawa Barat (Waruwu, 2023). Data diperoleh melalui teknik triangulasi, yaitu wawancara mendalam dengan informan kunci seperti Kepala Bagian Persidangan, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan staf Sekretariat DPRD, observasi tidak langsung terhadap pengelolaan program, serta dokumentasi berbagai dokumen anggaran dan laporan kegiatan. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder yang saling melengkapi dalam memberikan gambaran menyeluruh. Analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan, penyajian, reduksi, kategorisasi, dan penghubungan antar kategori untuk menghasilkan temuan yang mendalam dan relevan terhadap tujuan penelitian (Sugiyono, 2022).

HASIL

Penelitian ini menganalisis efektivitas pengelolaan anggaran Program Adikarya Parlemen DPRD Provinsi Jawa Barat berdasarkan delapan kriteria efektivitas menurut Makmur (2011). Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa program ini telah berjalan cukup baik, meskipun masih ditemui beberapa kendala dalam pengelolaannya yang memengaruhi tingkat efektivitas secara substantif. Pembahasan hasil penelitian untuk setiap kriteria dibahas dalam penjelasan berikut ini :

a. Ketepatan Penentuan Waktu

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, pelaksanaan Program Adikarya Parlemen secara umum dirancang berjalan setiap bulan. Sekretariat DPRD rutin mem-

berikan pengingat kepada anggota DPRD terkait waktu pelaksanaan dan penayangan publikasi. Namun, di lapangan masih ditemukan keterlambatan pengumpulan dokumen tagihan dan pertanggungjawaban, yang sering kali disampaikan setelah bulan pelaksanaan. Meskipun demikian, selama dokumen tidak melewati batas akhir tahun anggaran, pembayaran tetap dapat dilakukan.

Temuan ini menunjukkan bahwa aspek ketepatan waktu masih menjadi persoalan utama dalam efektivitas pengelolaan anggaran. Ketidaktertiban dalam penyerahan dokumen dapat berimplikasi terhadap akurasi pelaporan dan kredibilitas program. Meskipun pembayaran diperbolehkan selama masih dalam tahun anggaran, ketidaksesuaian antara waktu kegiatan dan waktu pencairan menunjukkan belum optimalnya pengawasan administratif dan kurangnya kepatuhan terhadap jadwal yang telah ditentukan.

b. Ketepatan Perhitungan Biaya

Program ini memberikan alokasi dana sebesar Rp5.000.000 per bulan per anggota DPRD untuk kegiatan publikasi. Berdasarkan temuan penelitian, belum terdapat rincian teknis atau aturan spesifik mengenai bagaimana dana tersebut sebaiknya digunakan. Penggunaan anggaran sangat bergantung pada kebutuhan masing-masing anggota, baik dalam hal jumlah media, jenis platform, maupun lama tayangan.

Ketidakhadiran standar harga satuan (SHS) dan minimnya pedoman teknis membuat penggunaan dana menjadi tidak seragam. Hal ini berdampak pada efektivitas biaya yang sulit diukur secara objektif. Dengan fleksibilitas yang tinggi, program rawan mengalami ketidakefisienan, terutama jika anggaran tidak dimanfaatkan secara optimal. Rencana penerapan SHS pada tahun berikutnya menjadi langkah penting untuk meningkatkan keseragaman dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publikasi.

c. Ketepatan dalam Pengukuran

Berdasarkan hasil penelitian, evaluasi terhadap Program Adikarya Parlemen dilakukan secara administratif, yaitu melalui pengecekan jumlah tayangan dan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban. Tidak ditemukan adanya sistem evaluasi berbasis *outcome* seperti tingkat pemahaman publik terhadap informasi DPRD atau efektivitas publikasi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Indikator keberhasilan program

tidak mengukur sejauh mana tayangan berdampak pada hubungan antara anggota DPRD dan konstituennya.

Ketiadaan kerangka evaluasi berbasis hasil menunjukkan kelemahan dalam pengukuran efektivitas program secara substansial. Penyerapan anggaran yang tinggi belum tentu mencerminkan keberhasilan dalam membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat. Tanpa indikator dampak atau kepuasan publik, program ini berisiko menjadi rutinitas administratif semata, bukan alat penguatan representasi legislatif.

d. Ketepatan dalam Menentukan Pilihan

Pemilihan media publikasi diserahkan sepenuhnya kepada anggota DPRD. Sebagian besar memilih media online karena alasan efisiensi dan daya jangkauan yang lebih luas, meskipun tidak ada standar yang mengatur jenis media, jumlah tayangan, atau kriteria kelayakan. Sekretariat hanya menyarankan agar media yang digunakan merupakan media yang terdaftar di Dewan Pers, namun tidak memberikan pembinaan atau evaluasi lebih lanjut.

Minimnya pengaturan dalam pemilihan media menyebabkan potensi ketimpangan dalam efektivitas komunikasi antar anggota. Pilihan media yang kurang selektif bisa menyebabkan informasi tidak sampai ke target audiens. Dalam konteks pengelolaan anggaran publik, ketidakterstandaran ini menimbulkan risiko penggunaan dana untuk saluran komunikasi yang tidak optimal atau bahkan tidak kredibel.

e. Ketepatan Berpikir

Program Adikarya Parlemen dirancang dengan pendekatan yang bertujuan mendukung *personal branding* anggota DPRD sekaligus meningkatkan transparansi publik terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing wakil rakyat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar anggota DPRD memahami program ini sebagai sarana komunikasi politik yang efektif agar masyarakat mengetahui aktivitas, peran, dan kontribusi mereka selama masa jabatan.

Secara keseluruhan, pendekatan berpikir dalam pelaksanaan program sudah cukup tepat. Strategi yang menggabungkan aspek *personal branding* dan keterbukaan informasi ini berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas serta kedekatan antara

anggota dewan dan konstituennya. Meski fokusnya bersifat individual, program tetap relevan dalam konteks fungsi representasi. Untuk kedepannya, penguatan narasi edukatif serta integrasi konten dengan platform kelembagaan dapat semakin memperkuat nilai program sebagai bagian dari komunikasi politik yang bertanggung jawab.

f. Ketepatan dalam Melakukan Perintah

Secara prosedural, pelaksanaan Program Adikarya Parlemen telah dijalankan sesuai dengan standar operasional yang berlaku. Pemesanan media dilakukan melalui aplikasi Sivalen, transaksi melalui Mbizmarket, dan proses pencairan dana difasilitasi oleh Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah sistem terpadu yang dikelola pemerintah daerah untuk merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, hingga mengevaluasi program dan kegiatan pembangunan daerah secara terintegrasi (Seputra, 2020). Berdasarkan hasil penelitian, staf di lingkungan Sekretariat DPRD telah menjalankan tugasnya sesuai dengan alur yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, pelaksanaan program pada aspek ini sudah cukup baik. Kendala yang muncul lebih banyak disebabkan oleh faktor eksternal, seperti keterlambatan dari pihak ketiga (media massa) dalam menyerahkan dokumen tayang atau faktur, yang kemudian berdampak pada keterlambatan pelaporan oleh anggota DPRD. Oleh karena itu, meskipun internal DPRD telah menjalankan perintah dengan baik, diperlukan peningkatan koordinasi dan komunikasi dengan mitra eksternal agar seluruh tahapan dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan.

g. Ketepatan Menentukan Tujuan

Tujuan Program Adikarya Parlemen adalah untuk menyampaikan informasi kinerja anggota DPRD kepada masyarakat melalui media massa. Berdasarkan hasil penelitian, tujuan ini telah dipahami dengan cukup baik oleh para pelaksana program, yaitu untuk mendukung *personal branding* serta memperkuat transparansi atas aktivitas yang dilakukan oleh setiap anggota DPRD di daerah pemilihannya. Kegiatan yang dipublikasikan umumnya menampilkan informasi seputar tugas kedewanan, kunjungan kerja, hingga kegiatan reses.

Secara keseluruhan, tujuan program dinilai sudah relevan karena mampu meng-

gabungkan dua aspek penting dalam representasi politik, yaitu membangun citra personal yang positif di hadapan konstituen dan menyampaikan informasi publik sebagai bentuk pertanggungjawaban. Strategi ini turut berkontribusi dalam memperkuat hubungan antara anggota dewan dan masyarakat, serta menumbuhkan kepercayaan terhadap lembaga legislatif. Agar semakin optimal, ke depan perlu ditambahkan penguatan narasi kelembagaan agar program tidak hanya membangun citra individu, tetapi juga menunjukkan kinerja DPRD sebagai institusi yang kolektif dan akuntabel.

h. Ketepatan Sasaran

Masyarakat di daerah pemilihan merupakan target utama program. Namun, tidak ditemukan upaya untuk mengukur apakah informasi yang disampaikan benar-benar sampai dan dipahami oleh masyarakat. Tidak ada survei audiens, pemetaan distribusi media, atau indikator keterlibatan publik. Dampak publikasi terhadap peningkatan kedekatan masyarakat dengan anggota dewan pun belum terdata secara sistematis.

Ketiadaan evaluasi atas ketepatan sasaran membuat efektivitas program sulit dipastikan. Meskipun konten telah diproduksi dan ditayangkan, tanpa validasi penerimaan dari masyarakat, maka efektivitasnya menjadi asumsi semata. Untuk memperbaiki hal ini, perlu adanya integrasi antara strategi komunikasi politik DPRD dan riset audiens agar informasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik publik.

Perhitungan Tingkat Efektivitas

Untuk menilai keberhasilan DPRD Jawa Barat dalam mencapai tujuan Program Adikarya Parlemen, dapat dilakukan dengan menggunakan rumus :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

Klasifikasi tingkat efektivitas dapat dinilai atau diukur dengan menggunakan teori (Mahmudi, 2015) seperti pada Tabel 2 di bawah ini :

Tabel 2. Klasifikasi Tingkat Efektivitas

Persentase	Kriteria
100% Keatas	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif

80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Dibawah dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi (2015)

Untuk mengukur klasifikasi tingkat efektivitas dapat dilihat pada Tabel 3 berikut :

Tabel 3. Tingkat Klasifikasi Efektivitas Realisasi Anggaran Program Adikarya Parlemen DPRD Provinsi Jawa Barat

Program Adikarya Parlemen DPRD Provinsi Jawa Barat				
Tahun	Target	Realisasi	Persentase	Keterangan
2021	Rp7.200.000.000	Rp6.061.911.000	84.19%	Cukup Efektif
2022	Rp7.200.000.000	Rp6.496.093.000	90,22%	Efektif
2023	Rp7.200.000.000	Rp6.911.091.000	95.98%	Efektif

Sumber: Diolah Peneliti (2025)

Pada Tabel 3, Tren realisasi anggaran dari tahun 2021 hingga 2023 menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2021, realisasi berada di angka 84,19% (cukup efektif), naik menjadi 90,22% pada 2022 (efektif), dan mencapai 95,98% pada 2023 (efektif). Data ini menunjukkan peningkatan efektivitas dari sisi serapan anggaran.

Meskipun demikian, tingginya realisasi anggaran tidak serta-merta mencerminkan keberhasilan program dari aspek kebermanfaatan. Anggaran yang terserap tinggi tanpa indikator *outcome* yang jelas menimbulkan risiko pemborosan dan ketidakefisienan. Efektivitas sejati tidak hanya diukur dari sisi administratif, tetapi dari kemampuan program menjawab kebutuhan publik, membangun kepercayaan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.

Dengan demikian, pelaksanaan anggaran Program Adikarya Parlemen secara administratif menunjukkan tren positif, namun masih perlu diperkuat dari sisi kebijakan teknis, pengukuran dampak, dan standarisasi agar program ini benar-benar memberikan nilai tambah yang nyata bagi masyarakat dan lembaga DPRD itu sendiri.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan anggaran Program Adikarya Parlemen DPRD

Provinsi Jawa Barat secara umum telah berjalan cukup baik, baik dari sisi administratif maupun pelibatan anggota DPRD dalam upaya publikasi kinerjanya kepada masyarakat. Evaluasi melalui delapan kriteria efektivitas (Makmur, 2011) menunjukkan bahwa ketepatan dalam berpikir, menentukan tujuan, serta melakukan perintah telah tercapai secara memadai, terutama karena program ini mampu menggabungkan fungsi *personal branding* dan transparansi kegiatan anggota DPRD. Namun demikian, beberapa kelemahan masih ditemukan, seperti keterlambatan pelaporan, belum adanya standar teknis penggunaan dana, ketidakterukuran dampak publikasi terhadap masyarakat, serta kurangnya evaluasi terhadap sasaran program. Tingkat efektivitas anggaran dari tahun 2021 hingga 2023 menunjukkan tren positif secara kuantitatif, namun efektivitas substantif belum sepenuhnya tercapai karena belum terintegrasinya sistem pengukuran berbasis *outcome*. Oleh karena itu, disarankan kepada Sekretariat DPRD untuk segera menyusun kebijakan teknis penggunaan dana dan indikator evaluasi keberhasilan program yang lebih terukur, serta melakukan pelatihan administratif kepada staf dan sosialisasi kepada mitra media. Kepada anggota DPRD, disarankan untuk lebih mengedepankan narasi edukatif dan memperhatikan aspek kebermanfaatan publik dalam setiap konten yang ditayangkan agar program ini tidak hanya menjadi sarana pencitraan, tetapi benar-benar menjadi instrumen komunikasi representatif yang efektif dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. (2020). *Manajemen Keuangan Publik*. Penerbit Andi.
- Cindy, R. A. (2019). *Prosedur Penyusunan Anggaran Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang*. 11(2), 10–14.
<https://doi.org/10.16194/j.cnki.31-1059/g4.2011.07.016>
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023*. (2023).
- Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Majid, J. (2019). Akuntansi Sektor Publik. In *Pusaka Almaida*.
- Makmur. (2011). *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Refika Aditama.
- Mintarti, I., Nurharibnu, W., & Assistriadi, W. (2019). *Peran Dan Fungsi DPRD*.
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 189 Tahun 2021*. (2021).
- Seputra, N. K. S. K. A. (2020). Peran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Menunjang Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah. *Locus Majalah*

Ilmiah FISIP, 12(1), 60–69.

<https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/LOCUS/article/view/284/281>

Siagian, S. P. (2005). *Fungsi - Fungsi Manajerial*. Bumi Aksara.

Standar Operasional Prosedur Program Adikarya Parlemen Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, (2021).

Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kualitatif (Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif). *Metode Penelitian Kualitatif*, 1–274.

Waruwu, M. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2896–2910.